



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2. 1. Penelitian Terdahulu

Untuk memulai meneliti neoliberalisme dan kaitannya dengan kepemimpinan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengungkap topik serupa. Penelitian terdahulu pertama adalah sebuah tesis dengan judul, “Neoliberalisme Dalam Kebijakan Ekonomi Politik Luar Negeri Amerika” yang disusun oleh Rosalina Tobing, pada tahun 2000 dari Magister Sains Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Objek penelitian dalam tesis ini adalah kebijakan kesejahteraan yang dipromosikan oleh Amerika melalui Bank Dunia ke negara-negara lain dengan mengungkap program *welfare*. Fokus dari penelitian ini mengerucut kepada perubahan pemikiran *Embedded Liberalism*, dalam membentuk jaringan internasional pasar bebas dibawa kendali pemerintah internasional sebagai *invisible hand*.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menjelaskan pendekatan ekonomi politik internasional Amerika dalam membentuk perekonomian internasional pasar bebas atau *neoliberalism*, yang bertransformasi dari *Embedded Liberalism*. Tesis yang dibuat oleh Rosalina ini pun hendak menjelaskan peran Amerika dalam pengaturan manajemen dan penyusunan berbagai program kerja di

Bank Dunia dimana ada upaya dari Amerika untuk menggunakan lembaga ini demi menerapkan nilai-nilai serta ide-ide liberalisme baru ke kancah internasional. Terakhir, selaku peneliti Rosalina hendak menunjukkan bahwa dukungan Amerika dalam program *welfare* Bank Dunia merupakan alat untuk mensosialisasikan paham neoliberalisme demi mempermudah setiap negara masuk dalam percaturan dunia ekonomi pasar bebas.

Meskipun sama-sama menggunakan metodologi kualitatif dan meneliti isu neoliberalisme, ada beberapa perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan dari tesis 'Neoliberalisme Dalam Kebijakan Ekonomi Politik Amerika' karya Rosalina Tobing dari Universitas Indonesia dengan "Wacana Neoliberalisme dalam Kepemimpinan Nasional di Majalah Indonesia 2014 Edisi III" terletak pada model analisis wacana. Penelitian terdahulu membuktikan suksesnya Amerika menerapkan program bantuan *welfare* melalui Bank Dunia kepada negara-negara lain. Amerika memosisikan dirinya sebagai superior dan negara lain adalah inferior. Sementara itu, penelitian yang tengah dilakukan hendak membuktikan wacana pengentasan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam neoliberalisme di Majalah Indonesia 2014.

Tesis tentang Neoliberalisme dan Ekonomi Politik Amerika Serikat ini menjabarkan tentang tiga sudut pandang kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai salah satu promosi *welfare* program dari Bank Dunia yang ditandatangani negara-negara dunia ketiga secara resmi. Pertama, tentang sudut pandang politik yang mengedepankan nilai-nilai Amerika yang dipromosikan yakni demokrasi,

pasar bebas, dan penegakkan hak-hak asasi manusia. Amerika merasa perlu membantu Indonesia sebagai kawan yang berdemokrasi dengan memberikan bantuan JPS. Dengan tercapainya nilai-nilai tersebut, akan terciptalah *American moral goals* (tujuan moral), *American fundamental national interest* (kepentingan nasional) yang harus harmonis satu sama lain demi tercapainya *good governance* dan *good goverment*. Maka, negara-negara yang menandatangani secara otomatis *good governance*-nya dirangkul oleh Amerika melalui JPS itu sendiri.

Mengacu dari sudut pandang ekonomi pertama kali tujuan politik Amerika yakni melindungi kepentingan komersial masyarakatnya di luar negeri. Tak heran, Amerika mendirikan institusi hubungan ekonomi regional seperti *Uni Eropa*, *NAFTA*, *AFTA*, *APEC*, atau *East Asia Caucus* demi menjaga stabilitas ekonomi dan membuka pasar bebas. Sayangnya, krisis tidak dapat dihentikan keberadaannya. Krisis yang menerpa negara masing-masing di Asia berpotensi mengancam perekonomian internasional. Amerika ingin menghindari risiko krisis internasional memutuskan memanfaatkan JPS sebagai modal dengan memberikannya kepada negara-negara krisis demi memperbaiki perekonomian warganya. Konsekuensi putusan kebijakan tersebut dalam pemikiran neoliberal adalah proyek penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Project*) dan kebijakan deregulasi. Penyesuaian struktural meliputi liberalisasi pasar, liberalisasi investasi, pemotongan anggaran sektor publik, devaluasi nilai mata uang, dan upah buruh rendah. Sementara kebijakan deregulasi ialah mengurangi campur tangan birokrasi dan pemerintah dalam pengambilan keputusan dunia usaha dan privatisasi (swastanisasi) bidang-bidang yang dikuasai negara.

Dari sudut pandang sosial terbukti adanya penyuntikkan nilai-nilai sosial budaya Amerika melalui program JPS. Contoh nilai sosial tersebut adalah nilai produktivitas. Tesis ini menemukan hubungan sosial dan budaya yang terbentuk adalah semakin diagung-agungkannya nilai produktivitas dan kinerja yang berasal Amerika. Nilai produktivitas ini terimplementasikan dalam JPS yang maksimal dengan program *welfare* yang bertujuan mempercepat masuknya negara-negara penerima JPS ke pasar bebas. Nilai produktivitas ini pula yang mendasari kontrak kerjasama JPS dengan negara-negara. Pemerintah menandatangani kontrak dengan Bank Dunia, maka hubungan pencapaian *welfare* ini tak lebih dari kontrak kerja.

Penelitian terdahulu kedua berjudul “Hegemoni Ideologi Demokrasi Liberal Amerika Serikat dan Wacana *Global War On Terror* Dalam Media Massa” skripsi karya Mohammad Rinaldi, dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 2012.

Objek penelitian dalam skripsi Mohammad Rinaldi ini adalah Usamah bin Ladin selaku individu yang menjadi objek pemberitaan secara mendunia di harian Kompas. Harian Kompas, selaku media nasional di Indonesia membawa wacana *War on Terror* dari Amerika Serikat melalui pemberitaannya terhadap terbakarnya Usamah Bin Laden, oleh militer Amerika Serikat. Penelitian ini hendak menemukan dan membuktikan hegemoni Amerika dalam media nasional ketika memberitakan Amerika Serikat terhadap Usamah Bin Laden dengan citra yang positif. Peneliti menggunakan pandangan konstruksionisme dari Peter Berger dan Thomas Luckmann demi mengetahui latar belakang penyajian teks.

Adapun kesamaan penelitian *Global War on Terror* dengan penelitian tentang neoliberalisme yang tengah disusun adalah pada kesamaan metodologi. Keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi penelitian Analisis Wacana Kritis. Mohammad Rinaldi, menggunakan analisis wacana kritis metode Norman Fairclough. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan dalam tiga level, level mikro yakni tahap menganalisis teks berita, level meso yakni praktik diskursus dengan data wawancara, dan level makro yakni praktik sosio kultural. Demi memenuhi kriteria kualitas penelitian kritis, dilakukan pula analisis *historical situatedness*.

Tujuan penelitian ini adalah, menggambarkan representasi aksi pembunuhan Usamah bin Ladin oleh militer Amerika Serikat dalam pemberitaan Harian Kompas. Tujuan lain yang hendak dicapai dalam penelitian adalah menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang terkait dengan konstruksi aksi pembunuhan Usamah bin Ladin oleh militer Amerika Serikat dalam pemberitaan Harian Kompas.

Isu *Global War on Terror* yang diusung oleh media-media internasional masuk ke media-media nasional salah satunya Kompas. Rinaldi berhasil membuktikan adanya konstruksi Amerika sebagai negara superior dan *superhero* melalui teks berita yang dihasilkan. Kedua, dari aspek wawancara atau tahap diskursus, Mohammad Rinaldi berhasil membuktikan adanya kemenangan wacana *Global War on Terror* berdasarkan pengakuan dari salah satu pengambil kebijakan dan masuk jajaran tinggi di Harian Kompas, yakni redaktur pelaksana.

Berdasarkan wawancara ditemukan adanya kesengajaan dalam pembentukan wacana tersebut demi meredam simpatian Usamah bin Ladin di Indonesia. Pembuktiaan ini dijelaskan melalui wawancara dengan kenyataan adanya bentuk relasi-relasi seperti kunjungan pers atau media nasional ke Amerika. Wacana *Global War on Terror* pun dianggap lumrah sebagai nilai-nilai Amerika. Sementara nilai dan ideologi yang diterima sebagai kebenaran, yakni nilai patriotisme Amerika menumpas Usamah bin Ladin, yang sesungguhnya berbeda dari fakta. Ideologi Kompas, humanisme transendental dan nasionalisme justru tidak membuat wartawan kritis terhadap wacana *War on Terror* Amerika Serikat.

Dari aspek sosiokultural, dalam level makro terlihat ideologi demokrasi liberal dan wacana *War on Terror* Amerika dimenangkan melalui pengakuan sejarah sejak Perang Dunia II dan kemunculan *VoA (Voice of America)*, media yang digunakan sebagai corong transfer nilai-nilai Amerika kepada dunia.

Perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu tentang *Global War on Terror* dengan Neoliberalisme, terletak pada objek permasalahan, konteks sosial, dan kognisi sosial yang dikaji. Mohammad Rinaldi membahas wacana kritis teks berita terkait terorisme, sementara peneliti mengkaji teks berita terkait pemimpin penganut neoliberalisme. Kesamaan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis menjadi benang merah penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

**Tabel 2. 1.**

**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	Rosalina Tobing	Mohammad Rinaldi
<b>Judul Penelitian</b>	“Neoliberalisme Dalam Kebijakan Ekonomi Politik Luar Negeri Amerika”	“Hegemoni Ideologi Demokrasi Liberal Amerika Serikat dan Wacana <i>Global War On Terror</i> Dalam Media Massa”
<b>Metodologi</b>	<p>Pendekatan Kualitatif, dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertama, mengandalkan data kepustakaan meliputi; buku, artikel ilmiah, dan jurnal.</li> <li>- Kedua, menyusun data penelitian sesuai kebutuhan, menemukan permasalahan, membuat hipotesis, dan merumuskan tujuan penulisan</li> <li>- Ketiga; menghubungkan data dengan teori, dan</li> </ul>	<p>Pendekatan Kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis, metode dari Norman Faiclough.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis teks menggunakan Analisis Framming Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki.</li> <li>- Analisis Intertekstualitas</li> <li>- Analisis Level <i>Discourse Practice</i>,</li> </ul>



	<p>menuliskannya secara deskriptif-interpretatif, terkait gejala-gejala neoliberalisme dalam kebijakan ekonomi politik Amerika.</p>	<p>melalui wawancara mendalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis <i>Sociocultural Practice</i> dengan studi pustaka dan penelusuran. Tahap yang terbagi dalam tiga level lagi, yakni level situasional, level institusional, dan level sosial.</li> </ul>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>Amerika berhasil mengikat negara-negara penerima progam bantuan <i>welfare state</i> dari Bank Dunia dalam hubungan hierarkis yang menempatkan Amerika berada di posisi superior.</p> <p>Amerika terbukti sedang berusaha memaksimalkan potensi pasar bebas di negara-negara Dunia Ketiga. Maksimalisasi melalui JPS berbentuk liberalisasi keuangan.</p>	<p>Wacana yang dimunculkan dalam <i>Global War on Terror</i> dari Amerika adalah wacana yang dimenangkan.</p> <p>Pemahaman wartawan dikerdilkan dengan konstruksi bahwa Amerika berada di posisi yang benar, dalam konteks <i>War on Terror</i>. Dimana Usamah adalah teroris, dan ideologi</p>

	<p>Adapun landasan keputusan adalah memberi kebebasan hukum pada kekuatan pasar, dan memberi perhatian kepada pentingnya keputusan negara yang ekonominya kuat. Implikasinya, yakni ketergantungan negara-negara tersebut kepada Amerika. Semakin mudah bagi Amerika untuk menyuntikkan ide-ide pasar bebasnya yang memberikan kontribusi besar bagi ekspor Amerika. Tak hanya itu, nilai-nilai hukum Amerika yang diterapkan pada kancah internasional membuat negara lain tetap berkiblat kepada Amerika.</p>	<p>ekstrem yang dianutnya adalah kejahatan.</p> <p>Harian Kompas terbukti dengan ‘jurnalisme keping’nya mengkonstruksi hal ini secara simbolik, menyesuaikan dengan arus kebutuhan selera masyarakat dan kebijakan pemerintah</p> <p>Kompas menjadi corong Amerika Serikat dalam melanggengkan wacana <i>Global War on Terror</i>.</p>
--	---	--

## 2.2. Konsep yang Digunakan

### 2.2.1. Neoliberalisme

Istilah neoliberalisme mulai digunakan dan dikenal di kancah dunia internasional untuk menyebut sebuah paham ekonomi atau ideologi ekonomi pasar bebas dengan coraknya yang ekstrem (Priyono, 2009 : 1).

Neoliberalisme pada awalnya merupakan suatu teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia paling bisa dicapai hanya dengan meliberalisasikan kebebasan dan keterampilan *enterpreneurial* individu. Neoliberalisme juga menempatkan kebebasan dan keterampilan itu dalam suatu kerangka pranata yang dicirikan oleh pengukuhan hak milik pribadi secara kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey, 2009 : 3).

Oleh sebab itu neoliberalisme merupakan paham lanjutan dari paham ekonomi liberalisme klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1776 bahwa perekonomian harus berjalan bebas, tanpa campur tangan pemerintah (*laissez faire, laissez passer*). Adam Smith mengempanyekan tidak adanya pembatasan produksi, tidak adanya pembatasan hubungan dagang nasional maupun internasional, maupun tidak ada tarif cukai, serta pada tidak adanya intervensi negara terhadap pasar karena dipercayakan kepada *invisible hands*. *Invisible hands* menurut Adam Smith adalah sebuah kekuatan yang mampu secara otomatis menciptakan ‘tangan gaib’ untuk mencapai posisi pasar dan ekonomi yang seimbang (Muttaqin, 2009 : 2).

Harvey (2009: 14-15) menguraikan praktik neoliberalisme di berbagai negara. Menurutnya, paham ekonomi ini pertama kali diterapkan rezim Augusto Pinochet di Chile tahun 1973-1990. Kala itu, Augusto Pinochet berhasil menurunkan Salvador Allende, dari partai sosialis melalui Pemilu tahun 1970. Kudeta terhadap Salvador Allende ini spontan membuat kekuatan-kekuatan 'kiri' dianggap sebagai musuh negara. Golongan kiri pun menjadi sasaran pembersihan rezim militer. Kudeta ini mendapatkan dukungan dari korporasi-korporasi AS, CIA, dan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger. Bersama *Chicago Boys*, yakni para pemuda lulusan *Chicago School* yang menjadi ekonom penganut paham ekonomi neoliberal Augusto Pinochet membatalkan proses nasionalisasi dan melakukan privatisasi atas aset-aset publik, mengizinkan sumber-sumber daya alam (perikanan, kayu, dan lainnya) untuk dieksploitasi swasta tanpa harus mengikuti regulasi pemerintah. Penggusuran-penggusuran secara paksa terhadap hak-hak pribumi ini dilakukan melalui militerisme demi melakukan privatisasi atas jaminan sosial, dan memberikan kemudahan bagi masuknya arus investasi langsung oleh asing dan diciptakannya perdagangan yang bebas.

Harvey mencatat, implementasi kebijakan paham ekonomi neoliberal terjadi pula di beberapa negara lain di dunia antara tahun 1970-1990an. Di Iran, pemimpin negara Shah Iran memberikan kontrak-kontrak minyak kepada perusahaan Amerika Serikat. Berikutnya, tahun 1978, Pemimpin China Deng Xiaoping memulai langkah awal dengan meliberalisasikan ekonomi komunis dengan membuka diri terhadap gagasan kapitalisme. Cina pun akhirnya mencapai

tingkat perekonomian yang berkesinambungan dan tak tertandingi sepanjang sejarah manusia.

Harvey juga menguraikan, pada tahun 1979, praktik neoliberalisme pun menyebar ke Inggris. Perdana Menteri Inggris kala itu, Margareth Thatcher, membatasi kekuatan buruh dan mengakhiri stagnansi inflasioner, memberlakukan kebijakan privatisasi, dan menekan kekuatan buruh hingga terjadi pergolakan yang dahsyat di masa kepemimpinannya.

Di Amerika Serikat, Presiden Ronald Reagan, yang terpilih tahun 1980, merevitalisasi ekonomi AS dengan mendukung langkah-langkah yang diambil Bank Sentral yakni membatasi kekuatan buruh, menderegulasi sektor industri, pertanian, dan pertambangan serta meliberalisasi kekuasaan keuangan baik di pentas dalam negeri maupun di kancah internasional.

Mantan Direktur Bank Dunia, John Williamson semakin mengukuhkan paham neoliberalisme dengan menuangkan doktrin '*Washington Consensus*' pada tahun 1989. *Washington Consensus* adalah kesepakatan kebijakan antara *World Bank*, IMF, dan Kementerian Keuangan USA di Washington. Mengutip dari *Oxford University Press* (Sierra, Narcis & Stiglitz, E. Joseph, 2008 & Williamson, Johnson 1990) *Washington Consensus* lahir sebagai bentuk artikulasi yang brilian terkait respon bagaimana menjadi negara pemimpin untuk negara lain dari segi industrialisasi dan substitusi impor. *Washington Consensus* dalam rincian poin-poin doktrinasinya berargumen tentang konsep dasar ada tiga yang penting yakni, ekonomi pasar, keterbukaan terhadap dunia (globalisasi), dan disiplin

makroekonomi. Dapat disimpulkan isi *Washington Consensus* adalah gagasan neoliberalisme yang dipimpin Amerika dengan mengutamakan kinerja pasar karena dianggap pasar memiliki mekanismenya sendiri untuk mengurus secara spontan.

Demi langkah berkesinambungan para pendukung kebijakan ekonomi politik neoliberal banyak masuk dan menduduki jabatan yang berpengaruh di dunia pendidikan, dunia media, bidang kesehatan, dewan direksi korporasi, dan lembaga-lembaga keuangan, di lembaga-lembaga kunci negara. Mereka memasuki lini-lini dimana punya kekuatan untuk menetapkan peraturan-peraturan keuangan dan perdagangan pada level global. Neoliberalisme menjadi suatu modus diskursus yang hegemonik. Oleh sebab itu, pengaruh dari implementasi neoliberalisme bisa mengakar memasuki cara berpikir kita, sampai pandangan neoliberalisme menjadi pikiran kolektif ketika kita menjalani hidup dan memahami dunia (Harvey, 2009 : 5).

Kritik-kritik terkait praktik paham neoliberalisme mulai bermunculan dan mempertanyakan paham yang semakin terasa semu tersebut karena berupaya menyejahterakan rakyat. Kritik atas neoliberalisme dilontarkan oleh Karl Polanyi yang membahas tentang kemandirian pasar tanpa campur tangan pemerintah. Menurut Polanyi (2005 : 101) dalam esainya '*The Self-Regulating Market and the Fictitious Commodities: Labor, Land, and Money*' bahwa; pekerja, lahan (alam tempat pasar bekerja), dan uang, tidak bisa diperlakukan seperti komoditas sesuai dengan konsep neoliberalisme yang menyerahkan segala komponen dalam pasar bekerja sendiri dengan menikmati minimalisasi intervensi pemerintah demi

pendapatan laba termaksimal. Sebab pekerja adalah bentuk penamaan lain atas aktivitas manusia yang berjalan secara otomatis, dimana mereka bekerja bukan untuk dijual hasilnya saja tetapi untuk alasan lain, termasuk bukan untuk aktifitas seperti beristirahat dan bersenang-senang atau dimobilisasikan. Lahan adalah nama lain untuk alam, dimana tidak diproduksi pula oleh manusia dengan uang, sesungguhnya dipergunakan karena kekuatan kekuasaan sebagai aturan, tidak diproduksi seluruhnya tetapi datang dari mekanisme keuangan negara atau kebijakan bank. Oleh sebab itu, tidak satu pun dari mereka bisa dijual. Praktek gagasan neoliberalisme menurut Polanyi tidak akan bisa tanpa campur tangan pemerintah (Polanyi, 2005 : 101).

Masalah mendasar dalam penerapan neoliberalisme menurut Harvey (2005) adalah kenyataan akan pengalihan aset kekayaan dari massa rakyat ke tangan segelintir kelas dominan di dalam komponen masyarakat dan dari negara terbelakang menafkahi negara kaya. Kemudahan memberikan pinjaman dari IMF turut mewarnai modus untuk membuat negara kaya semakin memiliki saldo di negara terbelakang (Harvey, 2005 : 75).

Ada pula kritik secara langsung terhadap *Washington Consensus*. Richard Rosecrance dalam '*Kebangkitan Negara Dagang*' (1991 : 69), mengatakan neoliberalisme sesungguhnya menunjukkan keberhasilan Amerika yang diperoleh dari penanaman modal di wilayah-wilayah baru di luar Eropa dan Amerika Utara. Penanaman modal dilakukan di tempat yang tingkat keuntungannya paling tinggi. Terdapat dua kesimpulan akan hal itu yakni; *pertama*, sistem kapitalis berlaku

sebagai dogma supaya sistem tersebut bisa mengeruk keuntungan dari negara-negara Belahan Bumi Selatan. *Kedua*, masing-masing negara kapitalis bersaing untuk mendapatkan keuntungan, dan penanaman modal asing perlahan-lahan beralih ke sektor produksi, pasar, dan bahan-bahan mentah di negara-negara berkembang, sehingga menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran dan mungkin stagnansi ekonomi di Utara (Rosecrance, 1991 : 69).

### **2. 2. 1. 1. Pro dan Kontra Penerapan Neoliberalisme di Indonesia**

Di Indonesia gagasan neoliberalisme ini masuk dengan kekerasan berdarah dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia yakni G30S tahun 1965 dimana ratusan ribu orang diburu dan dibunuh karena dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dituduh berkiblat pada kebijakan-kebijakan sosialis dan komunis tahun 1965. Dengan kata lain, anggota dan simpatisan ini juga merupakan pertentangan bagi berkembangnya gagasan tentang 'kebebasan' atau neoliberalisme ini (Sangaji, 2009 : 15).

Muttaqin (2009: 3-4) bahkan menguraikan upaya Amerika yang hendak mempengaruhi sistem politik di Indonesia dengan menempatkan 'orang-orangnya' di pemerintahan Orde Baru. Soemitro Djojohadikusumo misalnya, mantan Menteri Perdagangan dan Industri ini merupakan pejabat yang pro Amerika. Soemitro, bersama Soedjatmoko merupakan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berkiblat kepada kebijakan pihak Barat. Hal ini tercermin dari berdirinya *School of Advanced International Studies* yang dibiayai oleh Ford Foundation. Soemitro sebagai pelaku di balik layar mengatakan sosialisme yang diyakininya termasuk



akses seluas-luasnya terhadap sumber daya alam Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi asing. Soedjatmoko di hadapan tokoh-tokoh Amerika di New York menyampaikan strategi *Marshal Plan* yang dibiayai oleh Ford Foundation di Eropa bergantung pada ketersediaan sumber daya di Asia. Saat itu, Ford Foundation sedang dipimpin oleh Paul Hoffman.

Muttaqin melanjutkan bahwa sejak tahun 1951, ketika Soemitro menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kampus ini bekerjasama dengan Ford Foundation mengatur pemuda Indonesia untuk disekolahkan di kampus terkemuka Amerika yakni MIT, Cornell University, Berkeley University, dan Harvard University. Inilah yang disebut sebagai cikal bakal *Mafia Berkeley*. Modus ini sama persis dengan yang dilakukan Amerika terhadap pemuda di Chile dan mereka lalu mendapatkan label *Chicago Boys*.

*Mafia Berkeley* memiliki peran penting sejak awal Orde Baru dalam meliberalisasi ekonomi di Indonesia. Tahun 1967, *Mafia Berkeley* mewakili pemerintahan Indonesia dalam konferensi yang digagas oleh *Life Time Corporation* di Genewa Swiss yang menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia. Pada tahun yang sama itu Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah Indonesia.

Sangaji (2013 : 15-18) menyatakan, Undang-Undang Nomor I/Tahun 1967 ini memperkenalkan kebijakan terbuka dan pro investasi asing sebagai salah satu upaya menghilangkan trauma nasionalisasi. Dengan demikian, pemerintah hendak menjamin tidak adanya nasionalisasi sentral dan pencabutan hak individu. Freeport,

sebagai perusahaan asal Amerika merupakan korporasi asing pertama yang memanfaatkan undang-undang tersebut. Tahun 1968, tepatnya di bulan Juni, Presiden Bank Dunia, Robert McNamara mengunjungi Jakarta kemudian menempatkan stafnya di Jakarta dalam jumlah besar.

UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik awal neoliberalisme. Sementara UU No.8/1967 menyebutkan, 'Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Indonesia memperkenalkan Kontrak Karya (KK) model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing yang dianggap liberal dalam dunia industri pertambangan karena perusahaan sangat ingin mendapatkan jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada nasionalisasi atau klaim hak milik, belum lagi ancaman sabotase, terorisme, pembatalan kontrak secara tiba-tiba, dan lainnya. Maka Freeportlah yang pertama kali memperoleh KK 1967, dan sukses mendapatkan perlakuan istimewa dari Pemerintah.

Draft KK itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi sepenuhnya disiapkan dan disusun oleh Freeport. Salah satu teknokrat yang diasosiasikan pula sebagai *Mafia Berkeley*, Moh. Sadli, mengakui KK Freeport saat itu adalah cara awal pemerintah menarik investasi asing. Padahal ketika pemerintah menandatangani KK Freeport, Papua belum menjadi bagian dari Indonesia karena dalam kondisi status bergabung dengan Indonesia atau referendum untuk merdeka sendiri. Maka fungsi negara neoliberal seperti Indonesia dalam proses ini menjadi

sentral untuk menjamin proses pengerukan mineral termasuk dengan militerisasi. Fenomena ini membidani lahirnya protes dan gerakan separatis yang mendapatkan penindasan dari negara seperti Organisasi Papua Merdeka.

Sangaji melanjutkan, bahwa dalam kasus Freeport terdapat dampak yang cukup masif yakni pencemaran lingkungan akibat kebijakan pertambangan yang sangat liberal. Mencuatnya sengketa tanah yang diambil secara paksa hingga berujung dengan pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan tuntutan perusahaan kepada negara yang membuat negara semakin melindungi hak-hak milik pribadi. Hak-hak milik pribadi yang dimaksudkan adalah hak perusahaan swasta, bukan hak kepemilikan petani.

Kejayaan penganut gagasan neoliberalisme yakni para *Mafia Berkeley* ini mencapai puncak karir kepemimpinannya dengan duduk dalam kabinet pemerintahan. Ambil saja contoh, Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan, Widjojo Nitisastro sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Emil Samil sebagai Wakil Ketua Bappenas, Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan, Subroto sebagai Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan, Moh. Sadli sebagai Ketua Tim Penanaman Modal Asing, Sudjatmoko sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Washington (Muttaqin, 2009 : 4).

Para teknokrat yang disebut juga *Mafia Berkeley* perlu diakui berprestasi dengan mencengangkan melalui program Pelita I terhitung sejak tahun 1969-1973, inflasi berhasil dikendalikan hingga dibawah dua digit. Tak heran, di penghujung tahun 1980, keberhasilan Indonesia menanggulangi inflasi dan kemiskinan

mendapat pujian dari Bank Dunia. Lembaga keuangan multilateral ini mengatakan keberhasilan Indonesia perlu dicontoh negara-negara lain (Ismantoro, 2009 : 39).

Sayangnya, *Mafia Berkeley* ini pula yang memformat pembangunan nasional Indonesia yang bertumpu pada hutang kepada Bank Dunia, dan IMF. Amerika pun semakin gencar menjalankan peran dan program ‘negara kesejahteraannya’ melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB. IMF bertugas menciptakan stabilisasi ekonomi, penjadwalan hutang, dan memobilisasi hutang baru, sementara Bank Dunia berperan memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian Indonesia (Muttaqin, 2009 : 4).

IMF yang ditunggangi oleh kekuatan negara-negara neoliberal seperti Amerika, Inggris, dan Jerman akhirnya mengucurkan dana bantuan kepada Indonesia namun dengan syarat-syarat khas neoliberalisme yakni; cabut subsidi, lakukan privatisasi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan pengebirian peran negara dalam sektor ekonomi (Ismantoro, 2009 : 42-43).

Oleh sebab itu, Ismantoro menjelaskan bahwa pada tahun 1998 ketika Indonesia terserang krisis akhirnya menerima pinjaman 23 miliar dollar dari IMF yang justru melilit Indonesia dengan hutang terhadap luar negeri. Krisis moneter dalam negeri pun makin bergejolak. Pengambilan keputusan akan kebijakan ini kala itu berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia, dan pemberian sejumlah dana tersebut dinamakan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rekam sejarah bantuan Bank Dunia ke Bank Indonesia melalui BLBI tahun 1997-1998

adalah bentuk pengimplementasian dari negara kesejahteraan liberal (*Liberal Welfare State*) AS yang memperburuk perekonomian Indonesia

Apabila merefleksikan ekonomi Indonesia Ismantoro mencatat bahwa yang seharusnya dianut oleh Indonesia berdasarkan konstitusi adalah ekonomi kerakyatan. Gagasan neoliberalisme sudah bertolak belakang dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri negara ini dan juga pengusung ekonomi kerakyatan berkehendak, jika kapitalisme berpijak pada paham pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka ekonomi kerakyatan justru sebaliknya, ia mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, terlihatlah bahwa rumusan neoliberalisme ini sangat berbeda dimana ekonomi kerakyatan diorientasikan kepada maksimalisasi partisipasi rakyat yang tujuan akhirnya bukan akumulasi kapital namun kesejahteraan rakyat.

### **2. 2. 1. 2. Neoliberalisme dan Media Massa**

Narenda (2003) menyebutkan bahwa di sisi lain kebebasan pers diterjemahkan seperti neoliberalisme, yakni sikap 'emoh pada negara'. Pers menjadikan negara sebagai musuh nomor satu dan seolah-olah harus melakukan resistensi terhadap negara. Padahal, tekanan dalam ruang internal pers bukan datang dari negara melainkan dari pemilik modal.

Sikap pers yang pro pada pasar bebas atau neoliberalisme dilihat dalam kerangka bahwa kebijakan neoliberal menjadi trend kebijakan pemerintahan. Kaum neoliberal menyadari, agar nilai-nilai pasar bebas dapat diterima di semua lapisan

masyarakat dibutuhkan bantuan media untuk menyebarkannya. Media akan selalu memunculkan bahwa isu kebijakan pasar bebas merupakan sesuatu yang alami dan yang terbaik (Narendra, 2003 : 82).

Prita Narendra mengutip dari buku *'Policing the Crisis'* karya Stuart Hall yang menunjukkan sisi semiotik dari teks para jurnalis dengan kondisi sosial politik di Inggris pada masa pemerintahan Margareth Thatcher. Ketika nilai-nilai tradisional di Inggris disingkirkan, terjadilah krisis moral dimana gaya hidup semakin konsumtif dan pola kehidupan remaja Inggris sangat permissive sehingga dianggap sebagai bentuk degradasi moral oleh generasi tua. Thatcher muncul sebagai harapan baru dengan prinsip autotarian populis yang menawarkan jalan keluar dari krisis. Kemenangan Thatcher merupakan kemenangan ideologis dimana Thatcher mampu memanfaatkan *common sense* masyarakat Inggris yang tengah dilanda krisis melalui media (Narendra, 2003 : 82 - 83).

Satu slogan neoliberal Thatcher yang dikampanyekan di berbagai media massa adalah; *'masyarakat itu tidak ada, yang ada hanyalah individu-individu'*. Dengan mengganyang slogan tersebut, Thatcher menguasai isu-isu yang muncul di media. Penguasaan debat wacana publik di media massa membuat kaum neoliberal memenangkan pertarungan ideologi di kancah *civil society*. Hal serupa juga ditemukan di Indonesia menurut seperti slogan-slogan Orde Baru di media massa, yakni 'tumpas' dan 'habisi' muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah masa itu. Slogan ini sebagai kunci *common sense* untuk pertarungan wacana dengan kaum separatism (Narendra, 2003 : 83)

Oleh sebab itu pers secara langsung maupun tidak langsung telah mempromosikan dan memelihara nilai-nilai neoliberal. Hal ini membubuhkan pertanyaan, status neoliberalisme sebagai obat krisis sungguh mampu menangani atau justru memperparah. Jika berpikir kritis dan realitis, kondisi pers yang kini adalah sebatas perpanjangan tangan pemodal untuk mempertahankan *status quo* (2003 : 84).

### **2. 2. 2. Wacana**

Untuk memahami wacana, kita perlu memahami definisi harafiah dari wacana itu sendiri. Contohnya *Collins Concise English Dictionary* (1988) bahwa wacana dapat berupa (1) komunikasi verbal, ucapan, percakapan; (2) sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan; (3) sebuah unit teks yang digunakan oleh linguist untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat (Eriyanto, 2001 : 2).

Eriyanto (2001 : 2) mencatat bahwa Roger Fowler (1977) mendefinisikan wacana sebagai komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan disini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi pengalaman.

Analisis wacana menurut kajian linguistik adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih melihat keterkaitan di antara unsur tersebut.

Dalam lapangan politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa, hal ini disebabkan bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan melalui bahasa ideologi mampu menyeras ke elemen-elemen kehidupan masyarakat (Eriyanto, 2001 :3).

Media memberitakan suatu peristiwa dengan menguras orientasi tertentu, sehingga perlu ada pendekatan khusus dalam menjelaskannya kepada kalangan masyarakat. Menurut McNair (1994) cara menjelaskan suatu peristiwa kepada kalangan masyarakat bisa menggunakan pendekatan politik-ekonomi. Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media seperti pemilik media, pemodal, dan pendapatan isi media merupakan komponen yang lebih menentukan konten dan wujud media. Mekanisme produksi berita dikaji sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dan struktur ekonomi. Faktor-faktor ini berkemampuan menentukan peristiwa apayang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan (Sudibyo, 2001 : 2).

Adapun James Gee hendak menjelaskan, bahwa wacana adalah sebuah makna yang menjadi tatanan yang terbentuk untuk dipakai sebagai *'forms of life'* yang menjadikan bahasa sebagai inti dari wacana (Locke, 2004 : 11). Pennycook (2001) dan Paltridge (2000) yang dikutip Locke (2004 : 13), istilah 'wacana' bisa digunakan dalam dua kategori luas. *Pertama*, wacana sebagai sebuah kata benda abstrak yang menunjukkan bahasa digunakan sebagai bentuk praktik sosial dengan



penekanan khusus pada unit besar seperti paragraf, ucapan, keseluruhan teks, dan genre. *Kedua*, wacana sebagai kata benda yang dapat dihitung atau *countable noun* (yang memungkinkan kemajemukan) yang menunjukkan praktik yang tidak hanya merepresentasikan dunia, tetapi menandakan dunia, mendirikan, dan membangun dunia dalam makna (Locke, 2004 : 5).

Locke (2004 : 32) melanjutkan bahwa wacana secara alami diperuntukkan bagi setiap subjek individu, melihat berbagai sudut pandang fenomena di dunia dengan kacamata sendiri dan menempatkan posisi dirinya sesuai dengan apa yang dirasakan 'common sense; dibandingkan berdiri atas realitas yang terkonstruksikan.

Sementara itu, Leewen (2004 : 6) mencatat perspektif Foucault (1977) bahwa wacana bukan hanya termasuk di dalamnya keluasan objek tetapi juga bentuk definisi untuk melegitimasi perspektif yang dihasilkan para intelektual yang ditetapkan dalam konteks. Wacana bukan hanya merepresentasikan yang tengah terjadi, tetapi juga mengevaluasinya, mendeskripsikan tujuannya, membenarkannya, begitu seterusnya, dan banyak aspek dalam teks yang representasinya menjadi lebih penting

Seperti halnya pesan, teks, dan wacana. Pesan adalah bentuk semiotika terkecil, ditandai dengan sumber dan tujuan serta konteks sosial dan tujuan. Sementara teks dan wacana merupakan unit yang lebih besar. Teks merupakan struktur pesan atau jejak pesan yang memiliki kesatuan sosial. Wacana merupakan proses sosial yang melekat pada teks.

### 2. 2. 3. Ideologi

Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *idea* dan *logis*. Kata *idea* berasal dari kata *idein* yang artinya melihat. Sementara kata *logis* yang berasal dari kata *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Defisini ideologi menurut Graeme Burton (2008 : 193) adalah seperangkat kepercayaan dan nilai yang melengkapi pandangan tentang dunia dan tentang hubungan kekuasaan antara orang-orang dan kelompok-kelompok.

Ideologi merupakan konsep sentral dalam kajian analisis wacana kritis. Hal ini dikarenakan teks, percakapan, dan produksi informasi lain adalah bentuk praktik ideologi dan cerminan dari ideologi tertentu. Ideologi melekat dalam seluruh proses sosial dan kultural, dan bahasa menjadi ciri terpenting bagi bekerjanya sebuah ideologi. Sehingga apa yang nampak dari struktur bahasa diandaikan sebagai struktur dari masyarakat yang mewadahi sebuah ideologi tertentu (Hermawan, 2006 : 8).

Adapun teori-teori klasik terkait ideologi diantaranya menyatakan ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan bertujuan mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka dalam satu tatanan masyarakat. Strategi utama untuk menjalankan hal ini adalah dengan menyadarkan khalayak bahwa dominasi diterima sebagai '*taken for granted*'. Wacana menurut Van Dijk (1988 : 25) dalam pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok yang dominan

dan mempersuasi, dan mana yang mengomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga nampak benar dan sah. Dengan kata lain, wacana mencakupi dan mempengaruhi *social representative* melalui kaum dominan (Eriyanto, 2001 : 13).

Seperti yang dikutip oleh Eriyanto ( 2001 : 13 – 14) dari Teun A. Van Dijk, ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota kelompok agar bertindak dalam situasi yang sama, mampu mengaitkan masalah mereka, dan berkontribusi membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Sehingga ideologi dari kelompok dominan hanya akan efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai sebuah kebenaran atau kewajaran. Bagi Van Dijk, hal ini menjelaskan fenomena yang disebut ‘kesadaran palsu’ yakni bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi.

Ada dua hal penting dalam implikasi ideologi yakni; pertama, ideologi bersifat sosial dan membutuhkan *share* diantara anggota secara kolektif. Kedua, ideologi secara internal meskipun bersifat sosial-kolektif, harus menyusun identitas kelompok yang membedakannya dari kelompok lain. Wacana tidak bisa dipahami sebagai suatu gagasan dan landasan yang netral dan alami, karena dalam setiap wacana selalu mengandung ideologi untuk mendominasi atau berebut pengaruh (Eriyanto, 2001 : 4).

## 2. 2. 4. Analisis Wacana

Theo van Leeuwen (2004) menjelaskan dalam linguistik untuk menafsirkan hal-hal lain di sekitar gunakan sistem (tata bahasa, paradigma), dilanjutkan proses menghasilkan interpretasi (*syntagms*), dibandingkan proses langsung yakni praktek menghasilkan sistem pemahaman baru dalam bentuk pengetahuan.

Analisis Wacana dalam studi linguistik menurut Eriyanto (2001 : 4) ini merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut.

Terdapat tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana yang dirumuskan oleh Mohammad A. S. Hikam. Pandangan pertama merupakan pandangan kaum *positivisme-empiris* yang melihat bahasa sebagai jembatan antara individu dengan objek di luar dirinya. Maksudnya, pengalaman-pengalaman individu dianggap dapat diekspresikan langsung melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi. Hal ini berlaku selama wacana dinyatakan dengan pernyataan yang logis, sintaksis, memiliki hubungan dengan pengalaman empiris, maka tidak ada kendala atau distorsi antara individu dengan bahasa. Ciri khas pandangan ini adalah suksesnya pemisahan antara pemikiran dan realitas (Eriyanto, 2001 : 4).

Konsekuensi logis dari pandangan ini menurut Eriyanto adalah individu tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai terselubung mendasar

dalam suatu teks. Sebab yang penting adalah apakah teks tersebut ditampilkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Maka analisis wacana menurut aliran positivisme-empiris ini mempertimbangkan kebenaran atau ketidakbenaran menurut kaidah sintaksis dan semantik.

Eriyanto melanjutkan, pandangan kedua adalah *konstruktivisme* yang dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi serta menolak pandangan positivisme-empiris yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Menurut pandangan konstruktivisme, bahasa bukan hanya sebagai alat memahami realitas objektif yang terpisah dari subjek. Justru sebaliknya, subjek merupakan faktor sentral sebagai pembicara atau penulis. Seperti yang dikatakan A.S. Hikam, subjek berkemampuan mengontrol maksud tertentu dalam setiap wacana sehingga subjek tidak dapat dipisahkan dari bahasa.

Kaitannya dengan analisis wacana, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap pesan-pesan tertentu dalam wacana yang bertujuan mengungkap maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Eriyanto mencatat upaya pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi pembicara atau penulis dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara atau penulis tersebut. Oleh karena itu, analisis wacana menurut pandangan ini dimaksudkan sebagai analisis untuk membongkar maksud dan makna tertentu.

Ketiga adalah *pandangan kritis* yang berupaya mengoreksi pandangan konstruktivis yang dianggap kurang sensitif terhadap proses produksi dan reproduksi makna, baik secara historis maupun institusional. Aliran

konstruktivisme dipandang belum menganalisa faktor-faktor hubungan kekuasaan yang melekat pada setiap wacana. Analisis wacana menurut pandangan kritis tidak dipusatkan kepada kebenaran maupun ketidakbenaran tetapi lebih menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Masih menurut Eriyanto, individu tidak dianggap sebagai subjek netral yang bebas menafsirkan pikirannya, karena apa yang ditafsirkannya dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam masyarakat. Demikian halnya dengan bahasa tidak dipahami sebagai medium yang netral diluar diri pembicara tetapi merepresentasikan peran dalam membentuk subjek tertentu, tema tertentu, wacana tertentu, maupun strategi di dalamnya. Kesimpulannya, analisis wacana dipergunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa.

### **2. 2. 5. Analisis Wacana Kritis**

Beberapa pemikiran tokoh-tokoh penggagas *Critical Discourse Analysis* atau analisis wacana kritis merincikan kajian ini dalam beberapa poin penting. Poin pertama di sebutkan, analisis wacana kritis memandang tatanan sosial yang tengah berlaku sebagai situasi historis, sehingga relatif dan terkonstruksi secara sosial dan dapat berubah-ubah. Selain sebagai tatanan sosial yang tengah berlaku dan terkonstruksikan, proses Analisis Wacana Kritis merupakan proses sosial yang terbentuk dan ditopang bukan hanya dari kehendak individu tetapi dari melebarnya konstruksi atau mengembangkannya realitas versi tertentu yang disebut wacana.

Analisis Wacana Kritis memandang wacana adalah hasil produksi ideologi tertentu yang terkonseptualisasikan (Locke, 2004 : 1-2).

Locke menunjukkan karakteristik analisis wacana kritis yang memandang kekuasaan sebagai sebuah dampak yang tak dapat dihindari. Analisis wacana kritis memandang analisis sistematis dan interpretasi teks berpotensi menyatakan wacana dan mengkonsolidasikan kekuasaan hingga menjajah subyek manusia melalui komunikasinya. Locke memandang kekuasaan sebagai upaya membangun subjektivitas yang mana tercirikan dan termanifestasikan dalam wacana. Adapun efek tak terelakkan dari kekuasaan atau sebuah struktur diskursif tertentu atau ciri lain adalah pengaturan hak istimewa atas status sosial kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pernyataan Locke merepresentasikan bahwa sebagian subjektivitas individu dibangun atau dibentuk dari wacana, sehingga wacana merupakan perwujudan di mana individu-individu berperan dan menjalankan peran mereka sesuai yang terkondisikan. Realitas pun disertakan baik secara tekstual maupun intertekstual melalui sistem bahasa verbal dan non verbal, sementara teks dilihat sebagai tempat menanamkan wacana. Analisis wacana kritis memandang analisis yang sistematis dan interpretasi terhadap teks sebagai pernyataan yang berpotensi dipergunakan yakni wacana bertujuan memperkuat kekuasaan..

Ada tiga hal yang Locke tuliskan untuk mencirikan karakteristik analisis wacana kritis, yakni; (i) analitis, karena memeriksa dengan sistematis dan terperinci suatu objek tertentu dengan maksud untuk menemukan satu atau lebih prinsip-prinsip dasar; (ii) wacana, karena analisis ini berorientasi terhadap pemakaian

bahasa dan pembentukan makna yang secara sosial dibangun melalui wacana; dan (iii) kritis, karena hasil yang hendak dicapai dari analisis ini adalah menemukan kemungkinan dampak-dampak sosial dari makna-makna yang dibentuk di mana khalayak telah diposisikan (Locke, 2004: 9).

Lain halnya dengan Locke, Eriyanto (2001 : 7-8) merumuskan definisi dan lima karakteristik analisis wacana kritis yang dirangkum dari pemikiran-pemikiran Teun A. van Dijk, Norman Fairclough, dan Wodak. Analisis wacana kritis menurut Eriyanto adalah sebuah upaya atau proses pemisahan atau penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang cenderung mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si jurnalis selaku individu dan jajaran redaksi sebagai bentuk sosial dari berbagai faktor. Selain itu harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana - pemakaian bahasa dalam tuturan tulisan – sebagai bentuk dari praktik sosial. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan



mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas. Menurut Eriyanto (2001 : 7-8), ada lima karakteristik analisis wacana kritis yang terdiri dari tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

Karakteristik pertama ialah tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Karakteristik ini mengasosiasikan wacana sebagai interaksi yang mempunyai tujuan tertentu. Wacana juga dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan entah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan lainnya. Maka, wacana merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol bukan sesuatu yang di luar kendali atau di luar kesadaran.

Karakteristik kedua adalah konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi dari suatu wacana. Wacana diproduksi, dimengerti, dan dianalisis dalam konteks tertentu. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Konteks melibatkan segala situasi yang berada di luar teks dan turut mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang ditujukan, dan sebagainya. Setidaknya ada dua konteks penting yang berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana atau siapa yang memproduksi wacana. Latar jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, atau agama dari partisipan dapat mempengaruhi suatu wacana. Kedua, setting sosial

tertentu seperti tempat, waktu, dan posisi pembicara atau penulis. Maka, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasari.

Karakteristik ketiga adalah historis. Berangkat dari asumsi bahwa wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang ada maka salah satu aspek penting untuk dapat mengerti wacana adalah menempatkan wacana tersebut terhadap konteks historis tertentu. Pemahaman mengenai wacana hanya akan diperoleh bila memberikan konteks historis, seperti situasi sosial politik di mana teks tersebut diciptakan. Oleh sebab itu, ketika melakukan analisis diperlukan tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu dan sebagainya.

Karakteristik keempat adalah kekuasaan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan faktor kekuasaan dalam proses analisisnya. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat karena setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan wacana, konsep kekuasaan juga penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Bentuk kontrol terhadap wacana bisa bermacam-macam, salah satunya adalah kontrol atas konteks. Siapa yang harus dan diperbolehkan berbicara, siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan. Oleh sebab itulah, kontrol di sini tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis dan mental. Kelompok dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak sesuai kehendaknya, karena

menurut Van Dijk, kelompok dominan memiliki lebih banyak akses dibandingkan yang tidak dominan.

Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca, tetapi juga bagian dari anggota suatu lembaga sosial tertentu. Hal tersebut melibatkan analisis wacana kritis tidak hanya menganalisa pada struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

Karakteristik yang kelima adalah ideologi. Suatu wacana merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi-ideologi tertentu. Teori tentang ideologi yang klasik mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak sama, seragam, menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dalam kelompok.

Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam analisis wacana kritis yang dicatat oleh Eriyanto (2001 : 15-16) adalah:

**a. Analisis Wacana Pendekatan Linguistik Kritis (*Critical Linguistic*)**

Pendekatan linguistik kritis menekankan analisisnya pada bahasa dalam kaitannya dengan ideologi. Dalam hal ini, ideologi ditelaah dari aspek pilihan bahasa dan struktur tata bahasa atau kalimat yang dipakai. Melalui bahasa, ideologi dalam taraf umum menunjukkan bagaimana satu kelompok berusaha memenangkan dukungan publik, dan

bagaimana kelompok lain berusaha dimarginalkan lewat pemakaian bahasa dan struktur gramatika tertentu

**b. Analisis Wacana Pendekatan Perancis (*French Discourse Analysis*)**

Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser, dan teori wacana Foucault. Bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa, dan materialisasi bahasa pada ideologi. Pecheux sebagai salah satu penggunaannya memusatkan perhatian pada efek ideologi dari formasi diskursus yang memposisikan seseorang, contoh penulis sebagai subjek dalam khalayak dengan situasi sosial tertentu.

**c. Pendekatan Kognisi Sosial (*Socio Cognitive Approach*)**

Pendekatan ini dikembangkan Teun Van Dijk yang menitikberatkan pada masalah etnis, rasialisme, pengungsi dan disebut sebagai kognisi sosial. Faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana untuk mengetahui posisi sosial kelompok-kelompok penguasa, dominan dan kelompok marjinal.

**d. Pendekatan Perubahan Sosial (*Sociocultural Change Approach*)**

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Wacana di sini dipandang sebagai praktik sosial. Maka ada hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan relasi sosial. Wacana juga melekat dalam situasi, institusi dan kelas sosial tertentu dan ada praktik kekuasaan. Menurut pendekatan ini wacana mempunyai tiga efek dalam perubahan sosial, yaitu (a) memberi andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan

posisi subjek, (b) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi relasi sosial, (c) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan.

**e. Pendekatan Wacana Sejarah (Discourse Historical Approaches)**

Analisis wacana harus memperhatikan konteks kesejarahan atau historis. Bagi Wodak, analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan sebagai domain di mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan sehingga realitas yang sebenarnya telah terdistorsi dan palsu.

**Tabel 2. 2. Analisis Wacana Kritis**

Paradigma	Kritis
Teori Wacana	Michael Foucault Louis Althusser
Model Analisis	Roger Fowler, dkk Theo van Leeuwen Sara Mills Teun A. Dijk Norman Fairclough

Dalam melakukan analisis wacana kritis terdapat berbagai model yang dapat diterapkan antara model Teun A. van Dijk dan Norman Fairclough.

### **2. 2. 5. 1. Analisis Wacana Model Teun A. van Dijk**

Model analisis wacana Van Dijk paling banyak digunakan karena model ini mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa digunakan dan dipakai secara praktis. Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh Teun A. van Dijk sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Istilah ini diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, yang menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.

Menurut van Dijk, analisis wacana tidak cukup kepada analisis terhadap teks saja, dikarenakan teks hanyalah hasil praktik produksi makna yang juga harus diamati. Penelitian mengenai wacana tidak bisa mengeksklusi seakan-akan teks adalah bidng yang kosong, sebaliknya ia adalah bagian kecil dari struktur besar masyarakat. Teks dibentuk dalam praktik diskursus, praktik wacana.

Van Dijk membuat penghubung elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang disebut kognisi sosial. Kognisi sosial mempunyai makna ganda. Pertama, ia menunjukkan bagaimana proses teks diproduksi oleh wartawan atau individu pekerja media, dan di sisi lain, menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat turut menyebar dan diserap oleh kognisi atau pengetahuan wartawan, dan digunakannya untuk membuat teks berita. Oleh sebab itu, perlu diteliti bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan mengapa teks yang tercipta menjadi sedemikian rupa. Bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan di masyarakat dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu (Eriyanto, 2001: 221-224).

Van Dijk mengusung tiga dimensi dalam analisis wacana, yakni teks, kognisi sosial, dan analisis sosial atau konteks. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Analisis wacana model ini menghubungkan analisis tekstual, yang hanya memusatkan perhatian pada teks, ke arah analisis yang komprehensif yaitu bagaimana teks tersebut diproduksi dengan turut melibatkan pembicara/penulis dan masyarakat (Eriyanto, 2001: 224).

Dimensi teks, yang kaitannya masuk dalam aspek analisis sosial. Dimana yang diteliti adalah struktur teks. Van Dijk memanfaatkan dan mengambil pola analisis linguistik terkait kosakata, kalimat, dan proposisi, serta paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Kognisi sosial merupakan dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu maupun kelompok pembuat teks. Inilah struktur yang membangun sebuah teks media atau berita, dimana masing-masing struktur saling mendukung satu dengan yang lain. Kita pada akhirnya tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, tetapi juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke dalam rangkaian pilihan bahasa tertentu, sampai dengan bagaimana diungkapkan melalui cara retorika tertentu. Struktur tersebut terdiri dari tiga tingkatan, yaitu struktur makro atau makna global atau umum, superstruktur atau kerangka teks, yang menentukan bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Terakhir, struktur mikro atau makna lokal.

Pertama, struktur makro adalah makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik yang diutamakan dalam teks tersebut. Kedua, superstruktur adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh meliputi bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Ketiga, struktur mikro adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang digunakan dalam teks wacana. Sehingga yang dapat diamati adalah dari bagian terkecil dari suatu teks antara lain; kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Penggunaan komponen-komponen kecil dalam teks tersebutlah yang dipahami Van Dijk sebagai bagian dari strategi wartawan, yang dipandang sebagai politik berkomunikasi. Sebab, struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika serta persuasi yang tengah dilakukan seseorang, kelompok tertentu, dan kelompok media ketika hendak menyampaikan pesan (Eriyanto, 2001: 226-227).

Tak hanya ketiga struktur tersebut, dalam dimensi teks terdapat elemen-elemen penyusun suatu wacana, antara lain tematik, skematik, latar, detil, maksud, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora (Eriyanto, 2001: 229-259).

Struktur-struktur yang ada dalam wacana sesungguhnya menunjukkan sejumlah makna, pendapat, serta ideologi yang mendominasinya. Sesungguhnya model Van Dijk turut memfokuskan bagaimana teks diproduksi melalui dimensi



analisis wacana kognisi sosial. Van Dijk mengasumsikan dengan pendekatan kognitif bahwa teks itu sesungguhnya tidak memiliki makna, sebab pembicara atau penulis atau wartawan yang memberikan makna kepada teks. Dengan kesadaran penuh, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa yang bisa menghasilkan teks. Untuk membongkar makna yang tersembunyi dari teks, dibutuhkan suatu analisis kognisi sosial dan konteks sosial. Dimensi ini berproses memasukkan informasi yang digunakan untuk menulis wacana tersebut meliputi wawancara, laporan, konferensi pers, atau debat parlemen (Eriyanto, 2001: 260).

Setiap wacana merupakan bagian dari wacana yang berkembang di masyarakat. Model ini sangat berkaitan dengan representasi sosial pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang dalam masyarakat dimana wartawan hidup dan terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam meneliti wacana, perlu dilakukan analisis intertekstual melalui dimensi ketiga dalam model ini yakni dimensi analisis sosial atau konteks. Poin penting dari dimensi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi melalui praktik wacana dan legitimasi. Maka dari itu, dimensi ini meneliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat (Eriyanto, 2001: 271).

#### **2. 2. 5. 2. Analisis Wacana Model Norman Fairclough**

Norman Fairclough, penggagas dan pemberi materi analisis wacana kritis, menelaah praktik diskursif ke dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi menurut gagasan

Fairclough terdiri dari: (i) perwujudan wacana secara linguistik dalam bentuk teks; (ii) proses konstruksi sosial seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang turut menentukan bagaimana teks dibuat, diedarkan, dan digunakan; dan (iii) representasi dari praktik sosial (politik, ideologi, dan sebagainya) (Locke, 2004: 8). Menurut Norman Fairclough, analisis harus dipusatkan bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Eriyanto 2001:285).

Norman Fairclough membangun model yang mengintegrasikan analisis wacana didasarkan pada linguistik, pemikiran sosial dan politik, serta terintegrasikan secara umum pada perubahan sosial. Wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, dibandingkan aktivitas individu atau merefleksikan sesuatu.

Model Norman Fairclough menekankan wacana merupakan bentuk dari tindakan seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu respon pada dunia dan khususnya menjadi bentuk representasi ketika melihat dunia atau realitas. Kedua, model ini mengimplikasikan hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu, seperti pada hukum atau pendidikan (Eriyanto 2001:286).

Model ini menganalisis linguistik, dengan menilik kosakata yang digunakan, semantik, dan tata kalimat. Fairclough turut memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana hubungan antarkata atau kalimat dalam teks berita tersebut hingga bergabung membentuk sebuah pengertian.

Tiga dimensi analisis wacana model Fairclough tersebut adalah dimensi teks, dimensi *discourse practice*, dan dimensi *sociocultural practice*. Ia menghubungkan tiga dimensi wacana tersebut dalam tiga proses analisis yang saling terkait. Pada dimensi teks terdapat *description* atau *text analysis*. Pada dimensi teks dan *discourse practice* terdapat *interpretation* atau *processing analysis*. Kemudian pada dimensi *discourse practice* dan *sociocultural practice* terdapat *explanation* atau *social analysis* (Locke, 2004 : 42).

Dimensi teks berfokus pada teks itu sendiri yang merupakan cara memastikan di mana posisi diskursif pembaca (Locke, 2004 : 43). Menurut Eriyanto (2001 : 286), dimensi teks model Fairclough berupaya menganalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat yang dapat berupa tulisan atau secara lisan melalui radio atau televisi. Dimensi ini juga menelaah koherensi dan kohesivitas antarkata atau kalimat tertentu sehingga membentuk sebuah pengertian.

Dimensi kedua model Fairclough adalah *discourse practice* yang berfokus pada bagaimana teks diproduksi serta keterkaitannya dengan teks serupa, bagaimana modus penyebarannya, dan bagaimana ia diterima, dibaca, ditafsirkan, dan digunakan oleh manusia (Locke, 2004: 42).

Analisis pada dimensi *discourse practice* berfokus pada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi (atau penerimaan dan interpretasi) teks. Locke (2004: 43) menyederhanakan pemikiran Fairclough mengenai dimensi kedua ini. Fokus kepada aspek produksi teks berkaitan dengan bagaimana teks muncul untuk

mengimbangi wacana lain. Fokus kepada aspek distribusi teks menganalisa pada bagaimana teks tertentu menjadi bagian dari rantai intertekstual yang ditransformasikan ke dalam teks-teks lain. Sementara fokus pada aspek interpretasi menganalisa sejauh mana pembaca diatur untuk menyetujui sebuah teks sebagai bacaan pilihan dan bagaimana pembaca merespon teks tersebut.

Dimensi ketiga adalah *sociocultural practice*, yang berfokus pada situasi sosial karena mempengaruhi produksi teks. Dimensi ini menganalisa berbagai praktik sosial budaya dan praktik diskursif di tingkat kelembagaan maupun tatanan masyarakat yang kemudian memberikan relevansi kontekstual yang lebih luas (Locke, 2004: 42).

Analisis dimensi *sociocultural practice* ini berupaya untuk menyelidiki apakah suatu teks mendukung praktik sosial atau hegemoni diskursif tertentu. Analisis level ini ingin menjawab apakah teks tersebut justru berdiri sebagai kontra hegemoni diskursif tertentu. Kesimpulannya, dimensi ini ingin mengeksplorasi apakah suatu teks mereproduksi praktik sosial atau diskursif di masyarakat atau terdapat dorongan transformatif dalam teks tersebut (Locke, 2004: 43).

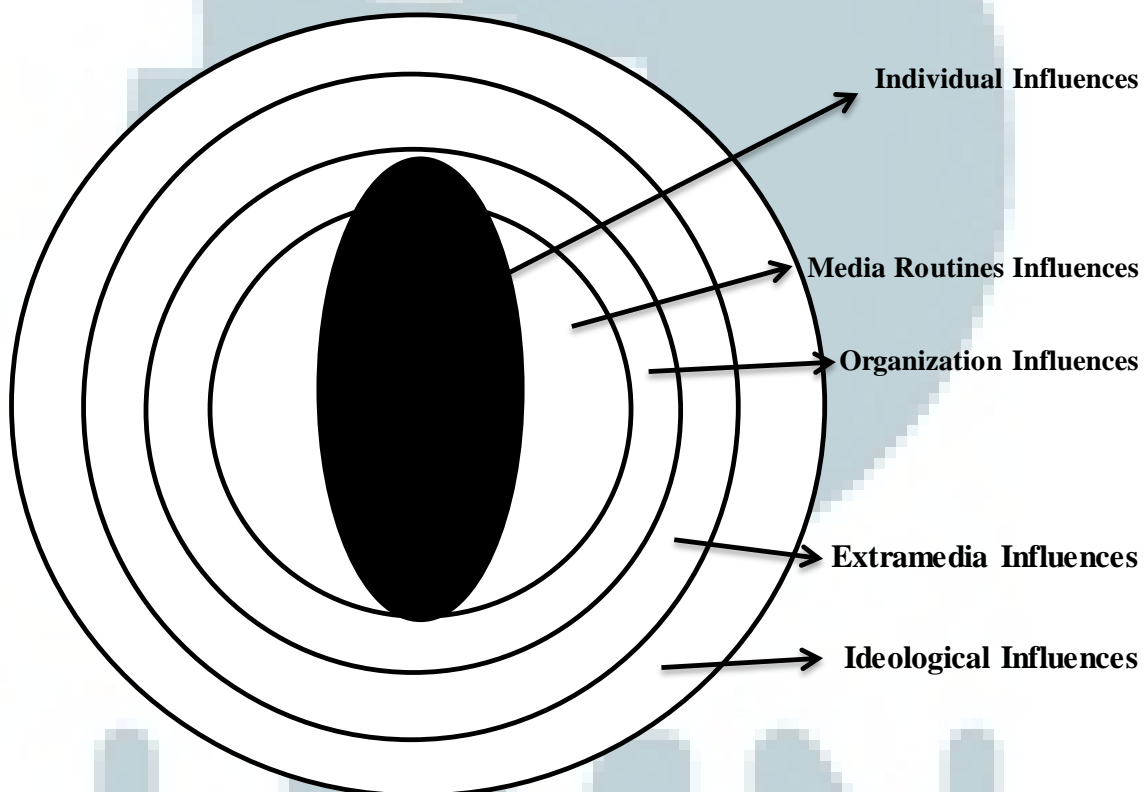
### **2. 2. 5. 3. Hierarchy of Influences Approach**

Analisis wacana kritis dekat dengan pernyataan bahwa media pada hakikatnya adalah hasil akumulasi dari berbagai pengaruh yang beragam (Sudibyo, 2001 : 7). Adapun pengaruh-pengaruh tersebut terdefiniskan sebagai '*Hierarchy of*

*Influences Approach*' yang bertujuan mengklarifikasi problem-problem profesional pekerja media massa (Reese, 2001 : 1).

Secara empiris, model hierarki membantu mengkaji dalam kondisi seperti apa dan faktor apa yang mendeterminasi konten hingga bagaimana mereka berinteraksi dalam ruang redaksi antar satu dengan lainnya (Reese, 2001 : 7).

**Gambar 2. 1.**



*Reconceptualization Hierarchy of Influence (Shoemaker and Reese 2011)*

#### 1. Pengaruh Individual

Dalam pengaruh individual ini *attitude*, keterampilan, dan latar belakang jurnalis atau pekerja media menjadi berpengaruh. Ada tiga faktor intrinsik pada individu yang bisa mempengaruhi media antara lain, karakteristik

komunikator, pengaruh sikap, dan kepercayaan atau nilai-nilainya. Tiga faktor tersebut akan tersosialisasikan dalam pekerjaannya.

## 2. Pengaruh Rutinitas Media

Rutinitas ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam pekerjaan praktis secara berkesinambungan pekerja media selalu butuh rekan lain. Perlu disadari bahwa setiap individu tidak memiliki kebebasan yang utuh untuk berkreasi terhadap apa yang diyakini dan apa yang ditunjukkan melalui sikapnya, tetapi harus dioperasikan dengan multitude dari teknologi, waktu, dan norma.

Tingkat ini menunjukkan pengaruh realitas sosial yang diproyeksikan oleh media. Tingkat ini dipengaruhi oleh tiga faktor yakni; produser dari organisasi media, penyedia sumber berita, dan konsumen audiens.

## 3. Pengaruh Organisasi

Tingkat organisasi akan menunjukkan tujuan dan kebijakan yang lebih besar terkait struktur sosial dan bagaimana kekuatan-kekuatan di dalamnya bekerja (Reese, 2001 : 9).

Peran individu dalam media sangat erat kaitannya dengan posisinya dalam hierarki organisasi. Keduanya menempatkan konten media sebagai sesuatu sebuah hasil keputusan produksi organisasi. Faktor-faktor dalam tingkat organisasi yang mempengaruhi isi media, meliputi peran-peran dalam organisasi yang mempengaruhi kebijakan, keputusan kebijakan, bagaimana penerapannya, serta pelaksanaan atau implementasinya di lapangan.

#### 4. Pengaruh Ekstramedia

Tingkatan ekstramedia mempertimbangkan hal-hal diluar badan media yang mempengaruhi konten. Pengaruh eksternal sesuatu yang umum tidak dapat dikendali oleh pekerja media yakni; sumber informasi untuk pengayaan konten berita, pengiklan, audiens, kontrol pemerintah, dan struktur pasar.

Dalam perspektif kritis, level ekstramedia ini menggambarkan perhatian khusus kepada media yang tersubordinatkan kepada para elit-elit media di dalamnya yang masuk dalam sistem yang besar (Reese, 2001 : 10).

#### 5. Pengaruh Ideologi

Analisis tingkat ideologi ini termasuk mengasumsikan tentang kekuatan dan bagaimana itu terdistribusikan di tengah masyarakat (Reese, 2001 : 11).

Ideologi adalah mekanisme simbolik sebagai kekuatan yang bersifat merekatkan dan memaksakannya pada komponen masyarakat. Oleh sebab itu ideologi berpengaruh pada produksi konten teks berita.

Oleh sebab itu berbagai faktor dalam tubuh media tersebut memiliki kontribusi dalam pengemasan dan penyusunan agenda konten yang hendak disuntikkan kepada khalayak. Rekonseptualisasi Hierarchy of Influences ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perbedaan kondisi setiap negara.

Dalam Majalah Indonesia 2014 faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dalam ruang ekstramedia, karakteristik khalayak berkontribusi. Hal ini mendorong majalah Indonesia 2014 melihat situasi rakyat Indonesia yang perlu menyikapi demokrasi dengan meningkatkan partisipasi, maka media menjadi ajang pendidikan politik demi tercapainya tujuan demokrasi yang sehat tersebut.

## 2. 2. 6. Komunikasi Politik dan Media dalam Kepemimpinan

Aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Hal ini dikarenakan politik seperti halnya komunikasi melibatkan kegiatan pembicaraan (Nimmo, 2005 : 8-9). Maka komunikasi politik menurut Anwar Arifin (2011 : 1) adalah pembicaraan untuk memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (*art of possible*) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (*art of impossible*).

Tujuan komunikasi politik yang sangat penting adalah memenangkan pemilihan umum (Arifin, 2011 : 219). Oleh sebab itu dalam kajian komunikasi politik, komunikator politik adalah para pemimpin atau yang disebut juga dengan para politikus, yakni mereka yang hendak berkomunikasi demi memegang jabatan pemerintahan. Dalam komunikasi politik ini memainkan peran sosial utama yakni proses pembentukan opini publik karena mereka hendak memberikan pengaruh ideologi mereka melalui komunikasi (Nimmo, 2005 : 29-31).

Dan Nimmo mencatat tak hanya para politikus ini yang bisa disebut sebagai komunikator politik. Ada pula komunikator-komunikator profesional yang mencari nafkah dengan berkomunikasi entah di dalam maupun di luar kancah politik. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif masih baru sebagai hasil lain dari revolusi bidang komunikasi yang memiliki dua dimensi utama yakni munculnya media massa yang memintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional dan



perkembangan serta-merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan (Nimmo, 2005 : 33).

Menurut James Carey seperti yang ditulis pula oleh Dan Nimmo bahwa seorang komunikator profesional adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Salah satu perangkat komunikator profesional adalah para jurnalis. Para jurnalis secara khas adalah karyawan organisasi berita yang menghubungkan sumber berita dengan khalayak.

Terkait kepemimpinan, dalam komunikasi politik dan kepemimpinan politik itu sendiri. Dan Nimmo turut mencatat definisi kepemimpinan menurut Ralph M. Stogdill bahwa kepemimpinan melibatkan proses kelompok, pengaruh kepribadian, seni meminta kerelaan, penggunaan pengaruh, persuasi, pencapaian tujuan, interaksi, peran-peran yang diperbedakandan pembentukan struktur-struktur dalam kelompok-kelompok. Stogdill pun juga mengutarakan pengamatannya bahwa kaum yang disebut para pemimpin memang memiliki beberapa sifat yang derajatnya sedikit lebih tinggi daripada bukan pemimpin.

Secara konsesus umum kepemimpinan adalah hubungan di antara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu atau lebih orang (pemimpin) mempengaruhi yang lain (pengikut) di dalam setting tertentu (Nimmo, 2005 : 40). Adapun hubungan-hubungan yang tercipta didalamnya terjadi akibat komunikasi. Maka citra kepemimpinan lahir dari komunikasi, dan demikianlah kepemimpinan

politik pun timbul dari penyusunan bersama, pertukaran modifikasi, dan kepercayaan, nilai, serta pengharapan bersama atas politik melalui komunikasi politik.

Alat yang digunakan komunikator politik profesional dalam merumuskan kepemimpinan adalah media. Media merupakan saluran komunikasi untuk memudahkan penyampaian pesan. Hal serupa diungkapkan pula Anwar Arifin (2011 : 159) bahwa kehadiran media khususnya media massa yakni kaum pers, radio, film, dan televisi telah mendorong retorika, propaganda, agitasi, kampanye, dan *public relations* politik, berkembang semakin pesat. Perkembangan ini diperlukan mengingat media massa berkontribusi besar dalam demokrasi.

Penggunaan media massa dalam kajian komunikasi politik ini sesuai untuk membentuk citra diri para politikus atau calon pemimpin. Dimana komunikasi politik yang dilaksanakan ini menggunakan media massa, dinamakan komunikasi massa dengan ciri-ciri mendasar bersifat umum, terbuka, dan aktual (Arifin, 2011 : 159).

Apabila melihat fokus kajian dalam ‘teori komunikasi kritis’ atau ‘teori media kritis’ adalah siapa yang mengontrol media massa bisa mengontrol agenda publik. Hal ini dikarenakan media massa dapat membuat agenda politik sesuai dengan ideologinya masing-masing yang dapat menguntungkan atau merugikan kekuatan politik tertentu melalui konten berita dan opini yang dimuat untuk khalayak. Media massa berkekuatan memengaruhi proses komunikasi politik terutama dalam pembentukan citra dan opini publik, sehingga setiap kelompok

termasuk organisasi politik berusaha memiliki, menguasai, dan mengontrol media massa (Arifin, 2011 : 162)

### 2. 3. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran peneliti menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk mengenai wacana perdebatan *neoliberalisme* dalam kepemimpinan nasional di rubrik *Wacana* yakni teks opini *Majalah Indonesia 2014* Edisi III.

Gambar 2. 2.

